

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, pembangunan daerah pedesaan masih berorientasi kepada kebutuhan daerah perkotaan (Liptop, 1977). Pendekatan pembangunan seperti ini akan menyebabkan potensi daerah pedesaan untuk menjadi pusat-pusat pertumbuhan sulit berkembang (Tjondronegoro, 1998). Jika pendekatan pembangunan untuk daerah pedesaan masih berorientasi pada kebutuhan daerah perkotaan, maka ketergantungan desa kepada kota akan semakin kuat. “Konsep pembangunan desa di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan nasional diciptakan pada tahun 1958” (Ndraha, 1982). Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (dalam Ndraha, 1982), tujuan dari Rencana Pembangunan Masyarakat Desa adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan melaksanakan program pembangunan yang berasaskan kekuatan sendiri dan permufakatan bersama antar anggota masyarakat, serta dengan bantuan dan bimbingan pemerintah yang bertindak sebagai penentu kebijakan pembangunan.

Beberapa penelitian dari berbagai tim peneliti, telah melaporkan bahwa pembangunan di Indonesia mengalami banyak hambatan kelembagaan ditingkat desa dan tingkat kecamatan (Tjondronegoro, 1998). Oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga formal yang berperan untuk menyalurkan informasi-informasi mengenai pembangunan dari pusat pemerintahan desa sebagai daerah tujuan pembangunan. Kelembagaan desa yang berkembang di sebuah desa akan sangat

bergantung dari karakteristik masyarakat desanya dan letak geografisnya. Kelembagaan desa yang berkembang di desa yang masyarakatnya masih bersahaja akan sangat berbeda dengan desa yang letaknya dekat dengan kota besar (Rahardjo, 1999).

Ketika sebuah desa masih memiliki karakteristik kesehajaan yang sebenarnya, maka lembaga yang berkembang adalah LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) yang berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dan ikatan daerah serta sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan (Rahardjo, 1999). Sedangkan lembaga baru atau modern yang berkembang di desa saat ini, sebenarnya belum seluruhnya bisa disebut sebagai lembaga yang sebenarnya (Rahardjo, 1999).

Menurut Syahyuti (2006), “pembicaraan pembangunan pedesaan akan sampai kepada seluruh masyarakat yang berada didesa mulai dari masalah kemiskinan, pengembangan pertanian dengan memproduksi berbagai komoditas, pembangunan subsektor, kehutanan, gender, keagrariaan, dan permasalahan sumber daya air”. Walaupun program-program pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah untuk daerah pedesaan memerlukan adanya peran serta lembaga modern sebagai wahana pelaksanaan, namun keberadaan lembaga ini belum mampu menjadi wadah bagi keberagaman di tingkat desa (Rahardjo, 1999).

Oleh karena itu, masih sangat diperlukan adanya peran serta dari LKMD dalam pelaksanaan pambangunan desa khususnya pada Desa Pergajahan Hulu, yang sesuai dengan judul penelitian **“Peran LKMD Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pergajahan Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dapat tercapai apabila dimulai dari jajaran terendah yaitu pemerintahan desa
2. Belum optimalnya masyarakat dalam pembangunan desa
3. Pembangunan di Indonesia mengalami banyak hambatan kelembagaan di tingkat desa khususnya pada Desa Pergajahan Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu pada identifikasi masalah diatas, masalah yang dikaji dibatasi mengenai bagaimana peranan LKMD dalam pelaksanaan pembangunan desa, yakni Desa Pergajahan Hulu Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran diatas, tulisan ini berupaya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan desa dalam kaitannya dengan pembangunan desa. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana peran kelembagaan LKMD desa terhadap pembangunan desa?
2. Langkah apa yang harus dilakukan masyarakat desa untuk meningkatkan peran LKMD desa terhadap pembangunan desa?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari tulisan ini adalah:

1. Mengetahui peran kelembagaan desa terhadap pengetahuan desa.
2. Mengetahui langkah yang harus dilakukan masyarakat desa untuk meningkatkan peran kelembagaan desa terhadap pembangunan desa.

1.5.2. Manfaat Penulisan

Secara akademis, penulisan proposal skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi bagi kalangan akademi dan menambah pengetahuan tentang peran kelembagaan desa terhadap pembangunan desa. Sedangkan secara praktis, penulisan makalah ini diharapkan mampu memberikan beberapa masukan mengenai pembangunan desa kepada pihak yang berwenang dalam membuat kebijakan program pembangunan. Selain itu, tulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pemahaman kepada pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti tentang topik tulisan ini lebih lanjut.